

SMA N

BALIKAH

10.PUTUSAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No. 0473/0/1983
tentang

Pembukaan, Penunjangan, dan Pengororian SMA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Mendisainc : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;

b. bahwa untuk memperbaiki daya tarung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunjangan, dan Pengororian SMA;

Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya; .
c. Keputusan Presiden Nomor 40/II Tahun 1980;
d. Keputusan Presiden Nomor 45/II Tahun 1983;
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/0/1979;
f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0145/0/1979, No.0222b/0/1980, No.0172/0/1983, dan No.0173/0/1983;

Menperhatikan Percontohan Menteri Negara Pendiayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor D-748/I/KEPAN/5/83 tanggal 29 September 1983;

N E N U T U S K A N :

Menetapkan :

Portama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
b. Menunjangkan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri;
c. Mengororikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

Kedua : Mendukung, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Portama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979.

Ketiga : Bagian organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Portama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

- Koempat : Menggunakan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktur "Portama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang searas dengan itu.
- Kixonan : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri adalah 1.062 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersebutdiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Nopember 1983
MENYERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.m.b
Sekretaris Jenderal,
ttd
Soetanto Wirjoprasonto

SALINAN Keputusan ini